

**STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBAT NAHDLATUL
ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
HUKUM BPJS KESEHATAN
SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

ERNAWATI

NIM.1402036041

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Sahidin, H., Drs., M.Si.
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang
Mashudi, H., Dr., M.Ag.
Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ernawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Ernawati
Nim : 1402036041
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBATH
NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG HUKUM BPJS
KESEHATAN**

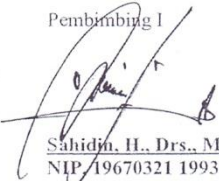
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Pembimbing I

Pembimbing II


Sahidin, H., Drs., M.Si.

NIP.19670321 199303 1 005




Mashudi, H., Dr., M.Ag.

NIP.19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ernawati
NIM : 1402036041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBAT
NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG HUKUM BPJS
KESEHATAN**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

19 Juli 2018


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.


Semarang, 19 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003


H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

Penguji I

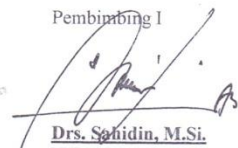
Penguji II



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001


Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005



H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1002



MOTTO

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ

وَأِلَى ^ز أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا 

Artinya: “Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan Rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja.”¹

(QS an-Nisa’ [4]: 83)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 118-119.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua ku tercinta (Bapak Nasimun dan Ibu Marfi'ah) yang telah mengasuh dan mendidik penulis, sehingga penulis bisa seperti saat ini. Terimakasih banyak bapak dan ibuk semoga bapak ibuk selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Nya. Amiin.
2. Saudara-saudaraku tercinta (Mas Arifin dan dek Lutfi Imam Syafi'i) yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, dan doa kepada penulis.
3. Kepada semua guru-guruku dari TK-Pergurun Tinggi, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mempunyai bekal dalam menyusun skripsi ini dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Untuk semua sahabat seperjuangan Muamalah 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, khususnya kelas MUB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2018

Deklarator



ERNAWATI
1402036041

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS Kesehatan tersebut, yaitu diantaranya Menurut keputusan Mu'tamar NU ke-33 pada tanggal 4 Agustus 2015 tentang hukum BPJS kesehatan bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad *ta'awun*. Dan adapun menurut keputusan ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V MUI pada tanggal 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan terutama yang terkait dengan akad antar para pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *garar, maisir dan riba*. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu Bagaimana Fatwa Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dan Bagaimana perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan berbagai macam literatur yang sesuai pembahasan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif-kualitatif dengan mengambil jenis doktrinal yaitu penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad *ta'awun*. Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah Cikura Tega Jawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *garar, maisir dan riba*. Perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan. Adapun persamaannya terkait dengan BPJS Kesehatan yaitu pada rujukan dalil al-Qur'an

(QS. Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong), serta persamaan persepsi mengenai konsep *ta'awun* yang ada pada BPJS Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan hadits (NU rujukannya hadits tentang tolong menolong sedangkan MUI rujukannya haditsnya tentang pengharaman Riba), metode istinbat hukum yang digunakan (NU menggunakan metode Qauli, Ilhahi, dan Manhaji sedangkan MUI menggunakan metode yang bersumber dari 4 sumber hukum yaitu, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas).

Kata kunci:Istinbat Hukum, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan BPJS Kesehatan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang memperoleh *Syafa'at* nya kelak di *Yaumul Qiyamah*. Aamiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Komparatif Metode Istinbath Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang BPJS Kesehatan”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Sahidin, H., Drs., M.Si. selaku Dosen pembimbing I, serta Bapak Mashudi, H.,Dr.,M.Ag. selaku Dosen pembimbing II, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan atas judul dalam skripsi ini.

3. Bapak dan ibu, kakak dan adek ku dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doa nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberi sesuatu yang istimewa selain ucapan terimakasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pembaca.

Semarang, 28 Maret 2018

Penulis

Ernawati

NIM. 1402036041

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Arab yang ditransliterasikan dalam bahasa latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Sa	Ṣ
ج	Jim	J
ح	Ḥa	Ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D

ذ	Ẓal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Ṣad	Ṣ
ض	Ḍad	Ḍ
ط	Ṭa	Ṭ
ظ	Ẓa	Ẓ
ع	‘Ain	‘ _
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qof	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘ —
ي	Ya	Y

2. Vokal

Huruf vokal pada huruf Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal huruf Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat* dengan transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fatḥah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U

Vokal rangkap pada huruf Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf dengan transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	Faṭḥah dan Ya	Ai
وُ	Faṭḥah dan Wau	Au

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda dengan transliterasi sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	Faṭḥah dan Alif Layyina	\bar{a}
اَ	Faṭḥah dan Alif	\bar{a}
يِ	Faṭḥah dan Ya	\bar{i}
وِ	Faṭḥah dan Wau	\bar{u}

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PENGANTAR.....	ix
TRANSILITERASI.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ISTINBAT HUKUM DAN BPJS KESEHATAN

A. Istinbat Hukum	
1. Pengertian Istinbat Hukum	26
2. Tujuan Istinbat Hukum	32
3. Berdirinya Nahdlatul Ulama.....	33

	4. Metode ijtihad Nahdlatul Ulama.....	39
	5. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia	40
	6. Metode ijtihad MUI	43
	B. BPJS KESEHATAN	
	1. Sejarah BPJS Kesehatan.....	45
	2. Pengertian BPJS Kesehatan	47
	3. Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan.....	49
	4. Landasan Hukum BPJS Kesehatan	50
BAB III	HASIL KEPUTUSAN NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BPJS KESEHATAN	
	A. Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU	
	Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan.....	51
	B. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015	
	Tentang BPJS Kesehatan.....	57
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBAT NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM BPJS KESEHATAN	
	A. Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama	
	Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam	
	Menetapkan HukumBPJS Kesehatan	70

B. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Dan Dasar Hukum Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Menghukumi BPJS Kesehatan.....	75
1. Metode Istinbat Putusan Nahdlatul Ulama (NU) tentang BPJS Kesehatan	75
2. Metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan	77
3. Dasar Hukum Putusan Nahdlatul Ulama tentang BPJS Kesehatan	82
4. Dasar Hukum Putusan Majelis Ulama Indonesia tentang BPJS Kesehatan	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
C. Penutup.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks salah satunya adalah dibidang sosial yaitu BPJS Kesehatan. Seperti telah dimaklumi, didalam kehidupan ini manusia dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin pula sebaliknya. Sebagai manusia penginnnya hidup sejahtera, sehat, dan aman tanpa ada gangguan termasuk melindungi diri mereka, namun manusia cuma bisa berikhtiar dan berdoa tetapi Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, manusia dihadapkan oleh berbagai resiko selama dia hidup, kapan dan dimana cuma Allah yang menentukan. Maka dari itu untuk meminimalisir resiko tersebut lembaga kementerian sosial yaitu kementerian yang bertanggungjawab terhadap jaminan kehidupan warga Negara Indonesia, salah satunya adalah BPJS Kesehatan datang atau dibangun tujuannya untuk mempermudah resiko yang mungkin akan terjadi dan kita tidak tahu kapan akan terjadi.

Menjalani kehidupan, manusia dihadapkan pada takdir dan nasib, manusia ditentukan oleh Tuhan. Dalam ilmu hukum ketentuan tersebut disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut memiliki potensi adanya resiko yang mungkin akan terjadi. Salah satu cara

untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan BPJS Kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam terdapat pro-kontra mengenai produk BPJS Kesehatan yang berupa Jaminan Kesehatan, Peristiwa keselamatan seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak – anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, yang akan menjadi resiko jika tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhannya kelak. Selain itu, seringkali pula manusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya sakit, kecelakaan dll. Hal-hal tersebut merupakan resiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya.¹

Manusia mempunyai sifat yang lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang, sifat kelemahan tersebut adalah ketidaktahuan manusia terhadap kejadian yang akan menimpanya. Manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya besok atau dimasa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At-Taghaabun [64]: 11 dan QS. Luqman [31]: 34.

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah

¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 5.

niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS. At-Taghaabun [64]: 11).²

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.(QS. Luqman [31]: 34).³

Berdasarkan ayat diatas, kita yakin bahwa musibah atau bencana terjadi atas kehendak Allah, dimana adanya musibah merupakan takdir Allah yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari oleh manusia, namun demikian manusia harus berikhtiar

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 814.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 585.

untuk mencegah, mengantisipasi, dan memperkecil resiko yang ditimbulkan dari musibah tersebut.

Simpul kata, ayat diatas merupakan salah satu kewajiban *syara'* dan agama demi melindungi individu dan masyarakat dari kehimpitan dan kesulitan. Dengan demikian, seorang mukmin (pemerintah) dengan mukmin lainnya (masyarakat) akan menjadi satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Agar dapat menjadi manusia bermanfaat yang memperoleh pahala dan ganjaran dari Allah, baik didunia maupun akhirat.

Memperkecil resiko tersebut pemerintah bertanggung jawab terhadap jaminan kehidupan warga Negara Indonesia, yang mana jaminan kehidupan tersebut adalah Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat untuk meminimalisir resiko yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Jaminan Sosial merupakan sistem yang telah berdiri sejak lama dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mendorong pembangunan dan strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Jaminan Sosial telah diakui sebagai satu strategi kebijakan sosial yang penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁵ Dengan harapan pelayanan kesehatan di Indonesia dari masyarakat kelas atas sampai ke bawah mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sama.

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional didasarkan pada prinsip-prinsip nirlaba, kegotongroyongan, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta. BPJS Kesehatan mulai beroperasi Januari 2014 dengan melakukan transformasi.⁶

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta

⁴ Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial*, Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 60 ayat (1), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 234.

⁵ Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial...* Pasal 1 ayat (1) dan (2), hlm. 208.

⁶ Irvan Rahardjo, *Politik Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Gagas Bisnis, 2012), hlm. 23.

memperkecil kesenjangan. Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko.⁷

Ketahui bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits bersifat umum atau global. Tidak semua persoalan masyarakat modern seperti sekarang ini dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an maupun Hadits, oleh karena diperlukan peran para ulama untuk mengeluarkan aturan-aturan hukum atau menetapkan hukum yang kita kenal dengan istinbath hukum. Meskipun para ulama diberikan otoritas untuk melakukan istinbath, penggunaan istinbath harus benar dan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Untuk menjadi mujtahid tidak gampang, diperlukan berbagai macam pengetahuan dan keahlian seperti memahami bahasa Arab dengan segala aspeknya, memahami al-Qur'an dan Hadits.

Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum dalam wacana hukum islam merupakan *spare part* yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para ulama ushul membahas metodologi penetapan hukum itu dalam

⁷ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

pembahasan *adillat al-ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.⁸

Menunjukkan bahwa agama adalah pendorong perubahan sosial. Artinya, orang yang memahami agama tidak boleh bersikap egois, mementingkan kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan kondisi dan nasib orang-orang disekitarnya. Orang yang mempunyai pemahaman agama secara benar pasti memperhatikan orang lain. Karena agama selalu mendorong pemiliknya untuk menebarkan kasih sayang, kerukunan, perdamaian, dan empati sosial. Bagi mereka, agama harus memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Sebagaimana fungsi al-Qur'an dan para utusan Allah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan (*dhulumat*) menuju cahaya (*nur*).⁹

Hukum adalah wahyu Allah yang berhubungan dengan orang *mukalaf*, baik sifatnya tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan kondisi ini dibakukan dalam salah satu kaidah fiqih, yaitu *Tagayyur al-Ahkam bitagayyur al-Amkinah wa al-Azminah wa al-Ahwal*, yakni bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan tempat, masa, dan kondisi yang mengitarinya. Kaidah ini dikuatkan dengan kaidah lain, yaitu *al-Adah Muhakkamah*, yakni kebiasaan yang ada dimasyarakat dijadikan

⁸ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 46.

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. iii-iv.

sebagai pijakan dalam menetapkan hukum. Kebiasaan tersebut harus diseleksi secara ketat dan dinyatakan tidak berlawanan dengan gagasan dasar dalam al-Qur'an dan Hadits (sunah).¹⁰

Adapun hukum ijtihad bagi semua umat Islam adalah wajib kifayah. Maksudnya adalah tidak boleh ada suatu masa yang kosong dari mujtahid mutlak. Apabila dalam suatu umat Islam terdapat orang yang mampu melakukan ijtihad mutlak, dimana ia dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin dalam peristiwa-peristiwa yang ingin mereka ketahui hukumnya, berarti umat islam tersebut telah melaksanakan kewajibannya. Namun, jika dalam suatu umat tersebut tidak ada satu pun orang yang mempunyai otoritas untuk melakukan ijtihad secara mutlak, maka semua umat tersebut berdosa. Itulah kewajiban kolektif (wajib kifayah). Adapun dalil-dalil tentang hal ini adalah firman Allah (QS. An-Nisa' :59).¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

¹⁰ Jamal Ma'ruf, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 31.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 20-21.

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Peristiwa-peristiwa semakin bertambah dan semakin banyak hal-hal baru dalam umat ini seperti muamalah-muamalah, kongsi-kongsi, dan transaksi-transaksi yang tidak ada keterangannya dalam nash-nash (Al-Qur'an dan Sunnah), dan tidak pula tersentuh oleh ijtihad sebelumnya. Karenanya, harus ada orang yang mempunyai otoritas untuk berijtihad secara mutlak agar menggali hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa tersebut dan menyesuaikan perundang-undangan dengan kemajuan zaman dan kebutuhan umat manusia. Sedangkan berhenti pada hasil ijtihad para mujtahid sebelumnya, berarti sama saja menghentikan perundang-undangan untuk sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan umat manusia. Asy-Syahrastani berkata dalam bukunya *Al-Milal wa An-Nihal*, “Nash-nash (Al-Qur'an dan Sunnah) terhenti atau terbatas, sedangkan permasalahan-permasalahan umat tidaklah terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak bisa dijangkau oleh Sesuatu yang terbatas. Karenanya, ijtihad dan qiyas selalu diwajibkan hingga dalam setiap peristiwa terdapat ijtihadnya sendiri.”¹²

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS Kesehatan tersebut, yaitu diantaranya Menurut

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 22-23.

Nahdlatul Ulama melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.¹³ Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan fatwa tentang BPJS Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura Tegal Jawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar, maisir dan riba*.¹⁴

Pada tanggal 4 Agustus 2015 pemerintah-MUI sepakat BPJS Kesehatan direvisi agar sesuai syariah. Untuk itu pada poin ketiga hasil kesepakatan disebutkan, program BPJS akan disempurnakan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-unsur *gharar, maisir, dan riba* inilah yang menyebabkan program BPJS disebut tidak sesuai syariah.¹⁵

Faktor penyebab perbedaan dikalangan para mujtahid yaitu hukum-hukum yang sama sekali tidak ada nash-nash yang menunjukkannya, baik yang bersifat *qath'i ad-dilalah* (pasti dan hanya

¹³ Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke II, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 115.

¹⁴ Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib.

¹⁵ Mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/ diakses pada tanggal 24 Februari pukul 8.45 wib.

memungkinkan satu makna), maupun yang bersifat *zhanni ad-dilalah* (yang memungkinkan banyak makna), dan tidak ada pula *ijma'* (konsensus para mujtahid) tentang hal itu. Hukum-hukum tersebut diketahui melalui *ijtihad*, baik dengan *qiyas*, *istishlah*, maupun perangkat lainnya yang ditetapkan syariat untuk mencari (menggali) hukum dari permasalahan yang tidak ada nashnya. Maka disinilah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para mujtahid.¹⁶

Menetapkan Fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masing-masing memiliki metode *istinbath* atau dasar hukum dalam menetapkan fatwa yang mana masing-masing memiliki perbedaan dan persamaan. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membandingkan metode *istinbath* dan dasar hukum fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghukumi BPJS Kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memperjelas dan dapat dijadikan pedoman kerja, serta untuk mencegah adanya kemungkinan timbulnya kesalahan dalam pembahasan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan?

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 43-45.

2. Bagaimana Perbandingan Metode Istinbat dan Dasar Hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Menghukumi BPJS Kesehatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghukumi BPJS Kesehatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun kalangan akademis pada umumnya dan memperdalam *khasana* keilmuan mengenai sistem pengambilan keputusan hukum lembaga-lembaga fatwa yang dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan.
2. Sebagai salah satu upaya pengembangan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai hukum BPJS sehingga masyarakat tidak ragu tentang hukum BPJS Kesehatan.

3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. TELAAH PUSTAKA

Melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan penulis kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan.

Skripsi Kardi Fidmatan, NIM 10400112005, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2016, dengan judul Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di dalam skripsinya membahas tentang Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang difokuskan pada sistem maupun teknis pelayanan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan dan memaparkan data-data yang diperoleh baik data-data primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yaitu sumber data diperoleh dari kajian-kajian pustaka dan berbagai macam literatur yang sesuai pembahasan, termasuk di dalamnya kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan baik dari segi sistem maupun segi

teknis, sehingga Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa pelayanan belum dilakukan secara maksimal, sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Fatwa ini juga merupakan dorongan dari lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan yang baik terhadap seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan tidak membedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.¹⁷

Skripsi Khurotun ‘Ainiah, NIM 102322001, Mahasiswi IAIN Purwokerto Tahun 2016, dengan judul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). Di dalam skripsinya tentang bagaimana pandangan NU terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan juga literatur lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu buku hasil-hasil muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan

¹⁷ Kardi Fidmatan dengan judul “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016). Repository.uin.alauddin.ac.id/1671/...diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 21.08 wib.

sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode *content analysis*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia sesuai dengan aturan *syara'*. Dengan mengedepankan prinsip *masalah mursalah*, dan prinsip *ta'awun* yang terkandung didalamnya, sehingga tujuan dari pada *maqasid asy-syari'ah* tercapai, menjadikan penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia diperbolehkan dalam pandangan NU.¹⁸

Skripsi Muhamad Syafii, NIM 13220209, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017, dengan judul Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasar Teori *Maslahah*. Didalam skripsinya tentang Pemberlakuan Denda Pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan peserta dalam mengiur. Ketidak disiplin peserta dalam mengiur ini berimbas pada devisa keuangan BPJS Kesehatan. Adanya peraturan terbaru tersebut

¹⁸ Khurotun 'Ainiah dengan judul "*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*", (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016). Repository.iainpurwokerto.ac.id/1005/ diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 18.26 wib.

juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah kepesertaan. Sebab, dinilai peraturan pemberlakuan denda terbaru tersebut tidak membebani peserta dan memiliki nilai kemanfaatan tinggi. Ada juga penilaian bahwa justru regulasi denda tersebut membebani peserta. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yaitu dengan mengkaji Pasal 17A.1 Perpres No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 12 Tahun 2013 Tentang BPJS Kesehatan, yang mengatur tentang Denda Pelayanan 2,5% kemudian melihat tingkat efektifitas dan nilai *masalah* peraturan tersebut di masyarakat. Efektifitas pemberlakuan denda pelayanan tersebut bisa dinilai dari beberapa aspek. Meliputi, peraturan perundang-undangan, penegak hukum, kepatuhan masyarakat, dan sarana prasarana. Dalam hal ini, efektifitas pemberlakuan denda pelayanan tersebut masih terkendala pada kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dimaksud. Sementara dari aspek *masalah* dan manfaat, denda pelayanan tersebut memberi kemudahan kepada peserta. Sebab denda hanya berlaku pada saat penggunaan rawat inap di Rumah Sakit dan hal itu masih dalam taraf kewajiban.¹⁹

¹⁹ Muhamad Syafii dengan judul “*Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016*” (Etheses.uin.malang.ac.id/6931/1/13220209.pdf diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 20.36 wib)

Skripsi Rina Muthmainnah, NIM 122311096, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, dengan judul Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Mukhtar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan. Didalam skripsinya membahas tentang bagaimana penggunaan metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memandang hukum BPJS Kesehatan dilihat dari perspektif ilmu ushul fiqh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Hasil skripsinya menyimpulkan bahwa metode penetapan hukum hasil Bahtsul Masail NU tentang BPJS Kesehatan adalah memakai metode manhaji artinya adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh Imam Mazhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al-Ushuliyah*). Hal ini dikarenakan para muktamirin dalam membahas masalah BPJS Kesehatan memakai rujukan al-Qur'an, as-Sunnah dan aqwal ulama. Penggunaan metode manhaji dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam perspektif ilmu ushul fiqh menurut penulis adalah bahwa metode manhaji digunakan dengan cara penalaran bayani yaitu metode dengan cara menganalisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ushul fiqh hal ini disebut ijtihad tatbiqi.

Jurnal Al- Ahkam: Vol. 8, No. 1 (2017): 1-25 ISSN 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Oleh Wasyith Uin Walisongo Semarang yang berjudul Revitalisasi Maqasid dalam Perbankan Syariah. Artikel ini memberikan jawaban Apakah sebenarnya tujuan inti dari perbankan syariah? Kenapa eksistensi perbankan syariah begitu penting? Tidak dapat dipungkiri, jawaban dari pertanyaan krusial mengenai tujuan pendirian perbankan syariah masih berupa diskusi sepotong-sepotong. Jika dikaji lebih dalam, perbankan syariah adalah entitas yang mempunyai karakteristik unik dan tersendiri, khususnya saat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah, baik secara teori maupun praktik, harus melakukan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*), khususnya dalam hal pengukuran kinerja yang tidak hanya terbatas pada parameter keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana revitalisasi konsep *maqasid* dalam keuangan syariah, khususnya perbankan.

Para ekonom Muslim terkemuka menegaskan bahwa perbankan Islam adalah bagian dari sistem ekonomi Islam secara holistik, yang berjuang untuk masyarakat yang adil dan seimbang seperti yang diharapkan dalam *maqasid*. Jika direnungi lebih dalam, pelaksanaan nilai-nilai *maqasid* merupakan sebuah kewajiban bagi setiap lembaga perbankan, sekaligus pemerintah.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kajian *maqasid* yang digali dari *khazanah* keilmuan Islam, dapat diaplikasikan dalam

ranah penelitian kontemporer, khususnya bidang ekonomi Islam, seperti tercermin dari konsep *maqasid* Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Majid Najjar. Karena itu, penelitian-penelitian sejenis sangat diharapkan: sebuah ijtihad reflektif menjawab tantangan kekinian dengan tetap memperhatikan akar dan tradisi keilmuan Islam. Jika dalam penelitian ini lebih berfokus pada dunia perbankan, revitalisasi konsep *maqasid* tentu sangat terbuka untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi lainnya.²⁰

Berdasarkan pustaka yang telah penulis jadikan rujukan, Penulis akan membahas yang belum dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi diatas adalah fokus masalahnya. Kelebihan penelitian, Penulis membandingkan metode istinbath Mukhtar NU ke-33 tanggal 4 Agustus 2015 di Jombang tentang hukum BPJS Kesehatan dan ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V MUI tanggal 7-10 Juni 2015 tentang BPJS Kesehatan.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data

²⁰ Jurnal Al-Ahkam, Wasyith dengan judul: Revitalisasi Maqasid dalam Perbankan Syariah, (Jurnal: UIN Walisongo Semarang: 2017 <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1823> diakses pada tanggal 18 Desember 2017).

dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²¹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a) Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan dengan mengambil bentuk penelitian *doktrinal*, Penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²
- b) Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini.²³ Yaitu tentang BPJS Kesehatan Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

²¹ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), hlm. 36.

2. Jenis Data (Bahan Hukum)

- a) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil keputusan hukum Lajnah Bahtsul Masail Yaitu Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke II Tahun 2015 dan fatwa MUI tentang Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015. UU yang dipakai NU dan MUI tentang BPJS Kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
- b) Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data sekunder yaitu, menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya, dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan Studi dokumen, meliputi studi bahan hukum sekunder ataupun undang-undang yang berlaku, menelaah literatur-literatur kepustakaan

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,... hlm. 53.

lainnya, dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

4. Metode Analisa Data

Menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*, dengan mengambil jenis *doktrinal* yaitu penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi
:.²⁶

- a) Reduksi data, yaitu memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data disini maksudnya peneliti menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil keputusan hukum Lajnah Bahtsul Masail yaitu buku Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke II Tahun 2015 dan fatwa MUI tentang Hasil Keputusan Ijtima' Ulama

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 21.

²⁶ Sayekti Pujosuarno, *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta, 1992), hlm. 19.

Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan.

- b) Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, bagan, maupun narasi.
- c) Kesimpulan dan verifikasi, adalah menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yaitu mengenai hasil metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang hukum BPJS Kesehatan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan secara global dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab dimana kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Gambaran umum tentang istinbath hukum, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan BPJS Kesehatan. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, pengertian istinbath hukum, tujuan istinbath hukum, berdirinya Nahdlatul Ulama, metode ijtihad NU, berdirinya Majelis Ulama Indonesia dan Metode ijtihad MUI. Kedua, membahas tentang sejarah BPJS Kesehatan, pengertian BPJS Kesehatan, prinsip-prinsip BPJS Kesehatan dan landasan hukum BPJS Kesehatan.

BAB III : HASIL KEPUTUSAN NAHDLATUL ULAMA DAN**MAJELIS ULAMA INDONESIA.**

Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Jombang dan fatwa MUI tahun 2015 di Tegal mengenai hukum BPJS kesehatan.

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN.

Bab ini berisi menganalisis perbandingan hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Jombang dan menganalisis fatwa MUI tahun 2015 di Tegal mengenai hukum BPJS kesehatan ditinjau

dari segi metode istinbath dan dasar hukum (*hujjah*) yang digunakan.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ISTINBAT HUKUM DAN BPJS KESEHATAN

A. ISTINBAT HUKUM

1. Pengertian Istinbat Hukum

Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum dalam wacana hukum islam merupakan *spare part* yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para ulama ushul membahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan *adillat al-ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.²⁷

Kata istinbath berasal dari kata “*istinbatha*” yang berarti “menemukan”, “menetapkan” atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Quran dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga term istinbath identik dengan ijtihad.²⁸ Jadi, menurut Ibrahim Husen,

²⁷Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 46.

²⁸ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 46-47.

istinbath merupakan istilah fiqh sedangkan ijtihad adalah istilah ushul fiqh.²⁹

Istilah istinbath ditemukan dalam QS an-Nisa' [4]: 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

Artinya: “Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan Rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja.”³⁰

Ayat di atas, menurut Iskandar Usman, memuat kata istinbath (*yastanbithunahu*) yang disandarkan kepada para ulama. Istinbath dapat berarti *istikhraj* (mengeluarkan hukum). Ayat di atas juga menjadi dalil bahwa ada beberapa masalah baru yang tidak bisa diketahui hukumnya dengan *nash*-nya kecuali dengan cara istinbath. Menurut ushul fiqh, secara etimologis, istinbath

²⁹ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 279.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 118-119.

berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Menurut istilah, istinbath adalah mengeluarkan makna dari *nash* dengan kekuatan dan kemampuan akal.³¹

Ali Hasballah mengartikan istinbath sebagai mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul fiqh, sehingga terma istinbath identik dengan ijtihad.

Definisi ini, tampaknya makna istinbath lebih khusus dari pada ijtihad. Jika ijtihad merupakan pengarah segala kemampuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum Islam yang baru dan belum ada penjelasannya dalam al-Quran atau al-Hadits, maka istinbath lebih berhubungan dengan pencarian makna dari *nash-nash* al-Qur'an dan al-Hadits. Jika demikian, objek kajian istinbath bisa jadi berdekatan, bersinggungan atau bahkan sama dengan ijtihad bayani. Keduanya sama-sama fokus pada *nash*, baik dari sisi susunan redaksinya maupun makna dari *nash* itu. Sebab susunan redaksi menentukan makna yang dikandung *nash* tersebut.³²

Menurut Ali Hasballah, ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam melakukan istinbath. Pertama, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Kedua,

³¹ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*,... hlm. 279-280.

³² Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*,... hlm. 279-280.

pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariat (*maqashid syariah*).³³

Kata istinbath bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi (w. 770 H) ahli Bahasa Arab dan Fikih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.

Ayat-ayat al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul Fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.³⁴

Secara garis besar, metode istinbath dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu segi kebahasaan, dan segi *maqasid* (tujuan) syariah.³⁵

a. Metode Istinbath Dari Segi Bahasa

Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fiqh adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami

³³ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*,... hlm. 280-281.

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 177.

³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 177-

teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam “*semantik*” yang akan digunakan dalam praktik penalaran fiqih. Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting dan akan di kemukakan disini adalah: masalah *amar*, *nahi* dan *takhyir*, pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq* dan *muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya. Secara ringkas hal-hal tersebut akan di jelaskan berikut ini.

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an dalam menyampaikan ajaran Allah dan begitu juga Sunnah Rasulullah ada yang berbentuk *amar* (perintah), *nahi* (larangan), atau *takhyir* (memberikan pilihan). Dari tiga kategori Ayat-ayat hukum itulah berbentuk hukum-hukum, seperti wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.

b. Metode Istinbath melalui Maqasid Syariah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut pandangan para ahli Ushul Fiqh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah disamping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan ruh *tasry’* atau *maqasid syariah*. Melalui *maqasid syariah* inilah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas

jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbath seperti dengan qiyas, istihsan, masalah mursal, dan urf yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Berikut ini akan diuraikan pengertian *maqasid syariah* dan peranannya dalam menetapkan hukum.

Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Peranan *maqasid syariah* dalam pengembangan hukum seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.³⁶

³⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 178-179.

2. Tujuan Istinbat Hukum

Berbicara tentang tujuan istinbath hukum tidak lepas dari pembicaraan tentang fiqh dan ushul fiqh, karena fiqh membicarakan sejumlah hukum syariah secara praktis yang didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terinci. Sementara itu, ushul fiqh membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang dipergunakan untuk mencari hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan istinbath hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.³⁷

Melalui kaidah-kaidah itu, kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan dan menetapkan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbathkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat didalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.³⁸

³⁷ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 7.

³⁸ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 7-8.

3. Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul berarti bangkit sekali, karena dalam istilah nahwu (gramatikal Arab) kata nahdlatul adalah مصدرَّمَرَّة (masdar yang menunjukkan sekali). Artinya, sekali bangkit selamanya tetap bangkit, tidak boleh mundur, walau setapakpun. Bangkit terus untuk menggapai kejayaan, kemenangan dan keemasan dalam semua aspek kehidupan yang dicita-citakan.

Ulama berarti orang-orang yang alim/pintar. Ulama ini tidak hanya orang yang memahami kitab kuning, tapi juga orang yang mengamati pergantian waktu, flora fauna, dan fenomena alam ciptaan Allah untuk meneguhkan keimanan dalam hati, memperluas cakrawala pemikiran dan menambahkan ketundukan kepada Sang Pencipta (*Al-Khaliq*), Allah Swt.³⁹

Menurut istilah Nahdlatul Ulama adalah *jami'iyah diniyah* yang berhaluan *Ahlu as-Sunnah waal Jama'ah* yang didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tidak terbatas.⁴⁰

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur merupakan organisasi

³⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 2.

⁴⁰ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU cet II*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 25.

kemasyarakatan Islam terbesar di Nusantara. Sebagian besar warga *jami'iyah*, berada di daerah pedesaan Jawa dan Madura. Basis massa yang demikian ini sering memposisikan NU menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Namun sebagai organisasi keagamaan yang berada dibawah kepemimpinan kyai ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam.⁴¹

Nahdlatul Ulama lahir sebagai penerus estafet dari apa yang diperjuangkan oleh walisongo yang menjadi penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ajaran yang diemban oleh walisongo ini mengikuti irama *Ahlusunnah Wal Jamaah* yang dilestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya, serta amalan-amalan dari banyaknya mayoritas umat Islam di Nusantara khususnya pulau Jawa, yang kebanyakan beraliran Sunni dengan mengikuti Madzhab Syafi'i dalam masalah kajian fiqihnya, dan Abu Hasan al-Asy'ari dalam masalah teologinya.⁴²

Awal berdirinya NU hanya memperjuangkan kepentingan keagamaan tradisionalis yang dianut sebagian besar

⁴¹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 1

⁴² Amirul Ulum, *Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 1.

masyarakat Indonesia. Dalam Anggaran Dasarnya yang pertama, Tujuan NU didirikan adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan bangsa. Namun sejalan dengan dinamika warganya, di tahun lima puluhan, NU terlihat dalam kegiatan politik praktis.

Maksud didirikan NU adalah untuk memegang teguh salah satu dari madzhabnya imam empat, dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam.⁴³

Fajrul Falah, salah seorang tokoh muda NU, merangkum tiga alasan pokok berdirinya NU:

- a. Aksi kultural untuk bangsa, yakni menggunakan strategi akulturasi dengan budaya setempat, dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat.
- b. Aktivitas yang mencerminkan dinamika berpikir kaum muda, dan
- c. Usaha membela keprihatinan keagamaan internasional, yakni munculnya gerakan Wahabiyah yang berusaha menghilangkan segala *khurafat* yang ada di kota suci.⁴⁴

NU didirikan oleh para kyai pesantren, antara lain KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Asnawi dan

⁴³ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 47.

⁴⁴ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*,.. hlm. 1-2.

lain-lain. Rais Akbar PBNU pertama dipegang oleh KH. Hasyim Asy'ari. NU merupakan *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* beraqidah Islam menurut paham *ahlusunnah wal jamaah* mengikuti salah satu empat madzhab dalam fiqh.

Bagian khusus NU yang mengurus masalah ijtihad hukum Islam adalah Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992.

Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh.

Bahtsul Masail al-Diniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan

Hadist, atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.⁴⁵

NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian tentang masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.

Masyarakat nahdiyyin, Bahtsul Masail tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga di bawah NU yang menjadi kawah candra dimuka. Karena dengan Bahtsul Masail, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan Bahtsul Masail ini dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.⁴⁶

Bahtsul Masail atau Lembaga Bahtsul Masail Diniyah (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan

⁴⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Cet III (Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007), hlm. 1.

⁴⁶ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*,... hlm. 39.

memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Hal ini menuntut Bahtsul Masail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

Sebuah lembaga fatwa, Bahtsul Masail menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari *nash* al-Qur'an, melainkan banyak aturan-aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan ijtihad baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.⁴⁷

Praktik Bahtsul Masail ini telah berlangsung sejak NU didirikan yakni 13 Rabi al-Tsani 1345 H/21 Oktober 1926 M. Waktu itu dilakukan sidang Bahtsul Masail yang pertama kali dalam sejarah NU. Untuk itu untuk melihat setting historis bahtsul masail harus mengetahui proses sejarah NU didirikan.

Berbeda dengan proses lahirnya NU, lembaga Bahtsul Masail sebetulnya telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren, jauh sebelum tahun 1926 di mana NU didirikan. Secara individual persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan tuntutan yang semakin tinggi, secara

⁴⁷ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*,... hlm. 39-40.

individual mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi kaum muslimin di sekelilingnya.⁴⁸

4. Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU)

Forum Bahtsul Masail dalam menjawab permasalahan hukum menggunakan 3 metode secara berjenjang, yakni qauli, ilhaqi dan manhaji.⁴⁹

- a. Metode qauli adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.
- b. Metode ilhaqi adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.
- c. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan

⁴⁸ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*,... hlm. 40-42.

⁴⁹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 132.

mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

5. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁵⁰

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 (dua puluh enam) orang ulama yang mewakili 26 (dua puluh enam) Provinsi di Indonesia, 10 (sepuluh) orang ulama yang merupakan unsur dari Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Berdasarkan musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang

⁵⁰ <https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I (satu).

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah serta jasmaniah yang diridhai Allah swt dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :⁵¹

a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warathatul Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

⁵¹ <https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

b. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai gerakan *Islah wa al-Tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai tentang perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian

diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia dan berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

e. Sebagai penegak *amar ma'ruf dan nahi munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah berhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas.

6. Metode Ijtihad MUI

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) dijelaskan tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (*adillat al-ahkam*) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Ayat 2 dtegaskan bahwa dasar-dasar dimaksud adalah al-Qur'an, hadits ijma, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya. Dari segi prosedur

penetapan fatwa dijelaskan dalam pasal 3 dan seterusnya.⁵² Secara ringkas, langkah-langkah penetapan fatwa MUI adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode al-jam'u wa at-tawfiq, dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melaui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh Muqaran.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad adz-dzariah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih amah) dan maqasid asy-syariah.⁵³

⁵² Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 300-301.

B. BPJS KESEHATAN

1. Sejarah BPJS Kesehatan

Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan di rumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen.

⁵³ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 20.

Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25% penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degenerative yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak ada yang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar.

Seperti menemukan air di gurun, ketika Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai “negara tanpa jaminan sosial” akan segera luntur dan menjawab permasalahan di atas.

Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004.

Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dimana Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep SJSN. Pernyataan Presiden tersebut

direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 (Ketetapan MPR RI No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2) dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI “Membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu”.⁵⁴

2. Pengertian BPJS Kesehatan

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan

⁵⁴<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>
diakses pada Tanggal 20 November 2017 pukul 8.40 wib.

adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.⁵⁵ Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁵⁶

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum didasarkan pada gagasan kerja sama diantara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka semuanya saling menolong dalam menghadapi

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, diakses 23 November 2017 pukul 8.45 wib.

⁵⁶ BPJS Kesehatan Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions), (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI., 2013), hlm. 2-6.

peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta, dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.⁵⁷

3. Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan

BPJS menyelenggarakan sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip:

- a. Kegotongroyongan
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Portabilitas
- g. Kepesertaan bersifat wajib

⁵⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28-29.

- h. Dana amanat dan Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan.⁵⁸

4. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁵⁹

⁵⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁵⁹<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/5> diakses pada Tanggal 20 November pukul 8.50 wib.

BAB III

HASIL KEPUTUSAN NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BPJS KESEHATAN

A. Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan

Persoalan BPJS Kesehatan dalam pandangan NU telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari ulama NU. Dalam kajian forum bahtsul masailnya, NU telah menetapkan hukum BPJS Kesehatan, berikut adalah hasil keputusan bahtsul masail NU tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan:

- Masalah
: Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syaria Islam?
- Jawaban
: BPJS Kesehatan sesuai syaria Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.⁶⁰
- Dasar pengambilan keputusan:
 1. Al-qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁶⁰Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU cet II*, (Jakarta: Lembaga Ta'rif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 25.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(QS. al-Maidah [5]: 2).

2. Hadist

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) متفق عليه

“Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain” (Muttafaq alaih).

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم , مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) متفق عليه

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit” (Muttafaq alaih).

عن النعمان بن بشير , قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ((المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه , تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر)) أخرجه مسلم

dari Nu'man bin Basyir berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Orang-orang beriman ibarat satu orang, jika

bagian kepala mengaduh, seluruh badan akan menderita demam dan tidak bisa tidur. (HR.Muslim).

وعن أبي موسى رضي الله عنه , قال : قال رسول الله عليه وسلم : ((إن إلا شعرين إذا أرملا في الغزو , أو قل طعام عيالهم بالمدينة , جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد , ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم)) متفق عليه

Dari Abu Musa ra, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang-orang Asy’ariy, apabila persediaan peperangan mereka hampir habis atau makanan bagi keluarga mereka di Madinah tinggal sedikit, maka mereka mengumpulkan sisa-sisa yang ada dalam satu kain kemudian mereka membagi-baginya sama rata pada satu bejana. Mereka itu termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka, (Muttafaq alaih).

3. Tafsir al-Baghawi

(وتعاونوا) أي : ليعين بعضكم بعضا , (على البر والتقوى) قيل : البر متابعه الأمر , والتقوى مجانية النهي , وقيل : البر : الإسلام , والتقوى : السنة , (ولا تعاونا على الإثم والعدوان) قيل : الإثم : الكفر , والعدوان : الظلم , وقيل : الإثم : المعصية , والعدوان : البدعة .

(dan tolong-menolonglah) yaitu membantu satu sama lain (dalam kebaikan dan takwa) kata kebaikan: adalah mengatasi permasalahan dan takwa adalah pencegahan, kata kebaikan: Islam dan takwa: sunnah (dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran) kata berbuat dosa: kafir, pelanggaran: dzolim, berbuat dosa: maksiat, pelanggaran: bid’ah.

4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh

أما التأمين التعاوني : فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا , لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين . وهو قليل التطبيق في الحياة العملية .

Asuransi tolong menolong adalah asuransi yang di sepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan kepada salah satu rekan guna membantu kesulitan yang sedang dialaminya pada saat hal-hal yang di khawatirkan terjadi dan hanya sedikit yang mempraktekan asuransi semacam ini dalam kehidupan kerja.

موقف الفقه الإسلامي من التأمين : لاشك كما تبين سابقا في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين : لأنه يدخل في عقود التبرعات , ومن قبيل التعاون المطلوب شرعا على البر والخير : لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس , لتخفيف اثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين , أيا كان نوع الضرر , سواء في التأمين على الحياة , أو الحوادث الجسدية , أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان , أو ضد المسؤولية من حوادث السير , أو حوادث العمل , ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح . وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره , ونجحت في مهامها وأعمالها , بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية .

Penjelasan kitab Al-fiqh al-Islamiy mengenai asuransi ialah tidak ditemukannya keraguan hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang di perbolehkannya praktek asuransi semacam ini dalam pandangan ulama-ulama fiqh muslim masa kini, karena hal tersebut merupakan akad-akad tabarru' (murni ibadah karena Allah SWT) dan juga merupakan bentuk sikap tolong-

menolong dalam kebaikan yang di anjurkan oleh syariat Islam, dikarenakan dalam kelompok tersebut setiap anggota (asuransi) memberikan bantuan kepada rekannya dengan suka rela bertujuan meringankan dampak atas bencana yang menimpanya dan membantu menghilangkan kesulitan yang sedang dialami salah satu rekannya dalam kelompok tersebut apapun kesulitannya, baik menyangkut kelangsungan hidup (asuransi jiwa, kecelakaan anggota tubuh, atau sesuatu yang di sebabkan oleh kebakaran , pencurian , matinya binatang-binatang ternak miliknya atau terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan mulai dari kecelekaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Asuransi tolong-menolong juga tidak melirik pada adanya keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham, atas asas-asas inilah maka perserikatan asuransi tolong-menolong mulai berkembang pesat di negara Sudan dan negara-negara lain dan mencapai tujuan maksimal yang dihasilkan dari kepentingan-kepentingan para asurador dan kinerja mereka dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan asuransi at-ta'awuni itu sendiri.

وأما التأمين بقسط ثابت : فهو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى المؤمن : وهو شركة التأمين المكونة أفراد المساهمين , يتعهد (أي المؤمن) بمقتضاه دفع أداء معين عند تحقق خطر معين . وهو النوع السائد الآن . ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو إلى شخص المؤمن أو إلى ورثته , فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين .

Asuransi bagian tetap (asuransi tijari) adalah asuransi yang keberadaannya dikuasai oleh pemegang saham atas ketersediaan asuransi meyerahkan cicilan pembaharuan kepada mereka (para pemegang saham), dan mereka berjanji untuk menyerahkannya kepada orang yang mereka tentukan ketika hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi dengan berdasarkan ketentuan

yang mereka buat ini adalah asuransi yang sedang banyak berlaku sekarang atau menyerahkannya kepada yang membutuhkan atau kepada pemilik saham sendiri atau kepada ahli waris mereka. Asuransi semacam ini merupakan akad mu'awadhoh yang menetapi dua sisi.

والفرق بين النوعين : أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم , ولا يسعى أعطاؤه إلى تحقيق ربح , وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء . أما التأمين بقسط ثابت فيتولاها المؤمن (أي الشركة المساهمة) الذي يهدف إلى تحقيق ربح , على حساب المشتركين المؤمن لهم . وكون المؤمن له قد لا يأخذ شيئاً في بعض الأحيان لا يخرج التأمين من عقود المعاوضات , لأن من طبيعة العقد الاحتمالي ألا يحصل فيه أحد العاقدین على العوض أحياناً .

Adapun perbedaan antara kedua jenis asuransi ini ialah, kalau asuransi at-ta'awuni kendalinya di pegang oleh semua anggota (asuransi) bukan anggota lain dan para anggotanyapun tidak berusaha mendapatkan keuntungan mereka hanya berniat membantu meringankan kerugian yang menimpa sebagian anggotanya, sedangkan asuransi yang kedua dikuasai oleh pemegang saham yang lebih memprioritaskan pendapatan keuntungan dari banyaknya asuransi yang ikut bekerja sama, sedangkan keberadaan para asuransi sendiri yang tidak mengambil suatu bagianpun sewaktu-waktu dari asuransi tersebut tidaklah bisa menetapkan hal itu sebagai akad mu'awadhoh, karena tabiat akad yang mengandung jaminan pastinya menetapkan adanya ganti rugi/ imbalan yang di dapatkan oleh salah satu dari mereka.⁶¹

⁶¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU cet II*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 117-119.

B. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Diantaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan

pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Persoalan BPJS Kesehatan dalam pandangan MUI telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari ulama MUI. Dalam kajian forumnya, MUI telah menetapkan hukum BPJS Kesehatan, berikut adalah hasil keputusan MUI tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan:⁶²

- Masalah

Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?

- Jawaban

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *garar*, *maisir*, dan *riba*. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.

- Dasar pengambilan keputusan

⁶² Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib.

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah [2]: 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
 وَيُزَيِّدُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
 تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ
 فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ^ج وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ^ط إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٧﴾

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

279. *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

280. *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

[177] Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[178] Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

Al-Imran [3]: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

An-Nisaa' [4]: 36-39

﴿٣٦﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
 ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٧﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
 وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا
 ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
 مُّهِينًا ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
 وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَكُنْ

الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ
 ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
 وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka.

At-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن
صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

b. Hadits

Di antara *nash* yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Saw bersabda:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد , إذا اشتكى
عضوا تداعى سائر جسده بالسهر والحمى

"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam."

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri."

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له , ومن كان له فضل
من زاد فليعد به على من لا زاد له

"Barang siapa mempunyai kelebihan kendaraan yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan. Dan barang siapa mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa."

عن عبد الله , قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله , قال :
قلت : وكاتبه وشاهديه , قال : إنما نحد ث بما سمعنا . (رواه مسلم)

Dari Abdullah ra, ia berkata, "Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: Saya bertanya, "(Apakah Rasulullah saw melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?" Ia (Abdullah) menjawab, "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR Muslim)

عن جابر , قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله
وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . (رواه مسلم)

Dari Jabir ra , ia berkata, "Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata, "Mereka berstatus hukum sama." (HR Muslim)

عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يأتي على الناس زمان يأكلون الربا , فمن لم يأكله أصابه من غباره . (رواه النسائي)

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil) nya, ia akan terkena debunya.'" (HR an-Nasa'i)

عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه . (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya'" (HR Ibnu Majah)

عن عبد الله , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الربا ثلاثة و سبعون باب . (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR Ibnu Majah)

عن عبد الله بن مسعود , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومؤكله وشاهد به وكاتبه

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, "Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR Ibnu Majah)

عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأتين على الناس زمان لا يبق منهم أحد إلا اكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorangpun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena debunya.'" (HR Ibnu Majah)

c. Pendapat para ulama:

1) Ijmak ulama:

Adapun dalil Ijma' adalah sesungguhnya kaum muslimin disetiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/paceklik pada zaman Umar bin Khathab ra, dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzaki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

2) Dalil aqli:

Adapun dalil aqli untuk sistem Jaminan Sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang

berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya, runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.⁶³

⁶³ Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBAT NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM BPJS KESEHATAN

A. Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan

Adapun Fatwa Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.⁶⁴ Ini sejalan dengan semangat dan tujuan *At-Ta'min At-Ta'awun* (Jaminan Gotong Royong), yaitu kesepakatan beberapa orang atas kesanggupan masing-masing pada persekutuan tertentu guna mengganti kerugian yang mungkin menimpa salah seorang dari mereka pada saat benar-benar terjadi bahaya (musibah).

Forum Bahtsul Masail pra muktamar ke-33 NU yang di selenggarakan PBNU di pesantren krapyak Yogyakarta pada 8 Maret 2015 lalu, sepakat mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani BPJS Kesehatan. Mereka menyimpulkan

⁶⁴Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke II, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasir PBNU, 2016), hlm. 115.

bahwa konsep JKN yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut syariat islam.

Forum yang diikuti para kiai dari pelbagai daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan syariat islam. Mereka memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai akad *ta'awun*. Ketika disodorkan pertanyaan apakah mengandung riba, mereka menjawab bahwa akad BPJS tidak mengandung riba.

Ketua LBM PWNU Yogyakarta KH Ahmd Muzammil kepada NU Online pada Kamis (30/7) pagi mengatakan bahwa dulu jaminan itu hukumnya fardhu kifayah, tetapi sekarang fardhu ain bagi orang mampu untuk membayar iuran jaminan bagi mereka yang lemah ketika diwajibkan pemerintah.

Konsep *ta'awun* yang diberlakukan BPJS, menurut Muzammil, masuk dalam bab jihad seperti disebutkan Fathul Mu'in yakni *daf'u dhararin ma'shumin*. Sehingga disini pemerintah diposisikan sebagai administrator bagi orang kaya untuk membantu mereka yang lemah. "Kalau bicara halal-haram, BPJS sudah jelas halal. Tetapi harus dilihat apakah BPJS ini mengandung mashlahah atau mafsadat? Kita tinggal memperbaiki saja mana kurangnya, " sambil menunjuk kekurangan BPJS pada layanan kesehatan WNI diluar negeri.⁶⁵

⁶⁵<http://www.nu.or.id/post/red/684/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam> diakses pada tanggal 10 Juli 08 pukul 13.5. wib

Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura Tegal Jawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.⁶⁶ Alasan kenapa MUI mengatakan BPJS Kesehatan mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Menurut Ma'ruf Amin selaku ketua bidang fatwa MUI mengatakan masalah akad menjadi masalah penting didalam syariah termasuk didalam masalah ekonomi syariah. Dan kedua, status uang yang dikumpulkan oleh masyarakat atau nasabah statusnya apa punya siapa dan nanti mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum sendiri. Yang ketiga adalah yang menyangkut investasinya dana masyarakat itu diinvestasikan dimana kalau dia diinvestasikan di bank-bank non syariah atau di bank-bank konvensional maka dinyatakan investasinya tidak sesuai syariah. Jadi, BPJS itu kalau dilihat baik dari segi prosedural maupun dari segi substansial tidak sesuai dengan syariah.⁶⁷

Wakil ketua DSN-MUI Jaih Mubarak juga mengatakan yang pertama, kita harus tegaskan adalah bahwa DSN-MUI termasuk MUI

⁶⁶Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib.

⁶⁷Ma'ruf Amin selaku ketua bidang fatwa MUI di dalam wawancaranya siaran Kompas TV pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 4.58 wib. Lihat <https://youtu.be/LRwneyYyTGQ>

sangat mendukung dibentuknya BPJS karena itu bisa membantu untuk masyarakat banyak. Kita sangat mengapresiasi itu sebab dengan adanya BPJS ini kemudian masyarakat yang awalnya tidak punya cover ketika dia sakit misalnya itu di cover oleh BPJS. Tujuan itu dari segi syariah sangat bagus dan baik, tetapi apakah tujuan yang baik itu dan tujuan yang benar itu boleh tidak dilakukan dengan cara yang salah kan tidak boleh. Oleh karena itu kita mengharapkan tujuan yang mulia ini yang sangat baik ini mestinya juga dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Dan di sisi syariah cara yang baik dan benar itu adalah cara yang sesuai syariah. Nah, sekarang seperti apa dalam ilmu muamalah itu yang dipelajari bukan yang positifnya saja tetapi ada yang negatifnya artinya setiap ilmu muamalah itu terutama transaksi ada 4 hal inti yang harus dihindari yang pertama adalah terhindar dari *gharar* yang kedua terhindar dari *maisir* yang ketiga terhindar dari *bunga* yang ke empat terhindar dari *dharar* dan apabila ada salah satu ini maka transaksi itu tidak akan sesuai syariah. Dan sekarang kaitannya dengan BPJS kenapa MUI menyatakan tidak sesuai syariah antara lain adalah yang melekat pada BPJS menurut ilmu syariah itu *gharar* kenapa karena berdasarkan undang-undang BPJS masyarakat wajib ikut serta menjadi peserta BPJS kemudian wajib membayar premi dalam tanda kutip meng-iur setiap bulannya kepada BPJS ketika masyarakat membayar kemudian BPJS menerima dana itu dan akadnya itu apa kedudukan uang itu milik siapa. Saya kira melihat selama ini mudaratnya belum bisa dibuktikan

tapi yang bisa dibuktikan itu setidaknya-pertanyaan begini yang pertama dari segi akad tidak jelas kemudian membuat kepemilikan uang itu juga tidak jelas milik siapa itu harus dipastikan secara syariah dan ketika dana itu terkumpul misalnya disimpannya dimana kalau di simpannya di bank konvensional dalam bentuk deposito, giro atau tabungan yang ada bunganya berarti riba dan dua-duanya ini tidak boleh di dalam syariat islam.⁶⁸

Pada tanggal 4 Agustus 2015 pemerintah-MUI sepakat BPJS Kesehatan direvisi agar sesuai syariah. Untuk itu pada poin ketiga hasil kesepakatan disebutkan, program BPJS akan disempurnakan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* inilah yang menyebabkan program BPJS disebut tidak sesuai syariah.⁶⁹

Menurut penulis lebih condong pendapat NU karena indonesia bangsa yang majemuk tidak membedakan ras, suku, agama jadi tolong menolong tidak melihat orang itu muslim atau non muslim dimanapun tempat kalau kita mampu menolong harus ditolong. BPJS didalamnya tidak hanya orang islam tetapi ada non muslim jadi seharusnya kita saling menghargai perbedaan itu.

⁶⁸ Jaih Mubarak selaku wakil ketua DSN-MUI didalam wawacaranya siaran Metro TV pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 17.13 wib. Lihat <https://youtu.be/EN-qym01jFk>

⁶⁹ mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/ diakses pada tanggal 24 Februari pukul 8.45 wib.

B. Analisis Perbandingan Metode Istinbat dan Dasar Hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Menghukumi BPJS Kesehatan

a. Metode Istinbat Putusan Nahdlatul Ulama (NU) tentang BPJS Kesehatan

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah Bahtsul Masail yaitu:

1. *Qauliy* yang berarti pendapat, yaitu sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada kutub *mu'tabarah* dari para Imam Madzhab.
2. *Ilhaqi* yang berarti analogi, apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah *ilhaqi* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya). Berbeda dengan *qiyas* yang menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. *Ilhaqi* didefinisikan proses analogi hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan pendapat para Imam Madzhab.
3. *Manhaji* yang berarti metodologis, adalah menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah

kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam Madzhab.

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh lembaga Bahtsul Masail sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabar* dari kalangan empat Madzab, terutama Imam Syafi'i. Rifyal Ka'bah menjelaskan bahwa hal inikarena Nahdlatul Ulama gigih dalam mempertahankan tradisionisme Islam dan memberikan perhatian lebih kepada warisan pengkajian Islam yang berupa peninggalan pemikiran *salaf*.⁷⁰

Ketiga prosedur itulah yang menjadi faktor bagaimana NU sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Seperti terkait BPJS Kesehatan NU lebih banyak merujuk kepada kitab kuning seperti Tafsir al-Baghawi, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Fath al-Mu'in, Bughyah al-Mustarsyidin, Qurrah al-'Ain, Al-Furuq, Al-'Inayah Syarh al-Hidayah, Raudlah al-Thalibin, Syarh Ma'aniy al-Atsar li al-Thahawiy, Tahrir al-Kalam fi Masail al-Iltizam, yang mana kitab-kitab

⁷⁰ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 80-82.

tersebut berisi tentang tolong menolong sejalan dengan fatwa NU tentang BPJS Kesehatan yang sifatnya *ta'awun* (tolong menolong). Kitab Madzab menjadi urutan terbanyak sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. Bahkan al-Qur'an hanya satu sebagai rujukan pengambilan BPJS Kesehatan yaitu Qs. al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong. NU memandang Madzab Syafi'i lebih diunggulkan dari pada Madzab lainnya. Kefanatikan NU kepada salah satu Madzab ini sebagai bentuk adaptasi terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritasnya adalah bermadzab Syafi'i dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat.

b. Metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan

Pada dasarnya metode istinbat hukum MUI didasarkan pada 5 sumber hukum:⁷¹

a. al-Qur'an

Dalam menetapkan suatu permasalahan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil dasar hukum utama melalui Kitabullah yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.⁷²

⁷¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia , No. U-596/MUI/X/1997, Pasal 2.

⁷²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 20.

b. Sunnah (hadits)

Penetapan suatu permasalahan hukum selain mengambil dasar dari kitabullah juga mengacu pada Sunnah Rasul. Sunnah menurut para ahli Fiqh adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa serta akhlakunya baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul.⁷³

c. Ijma'

Secara etimologi, ijma' berarti kesepakatan atau konsensus, sedangkan pengertian secara etimologi ijma' adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.⁷⁴ Dalam menetapkan suatu hukum MUI jika hukum yang dikaji secara rinci tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka dilakukan ijma'.

b. Qiyas

Qiyas adalah metode untuk menetapkan hukum-hukum *syara'* atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada *nash* al-Qur'an maupun Haditsnya, dengan cara meng-qiyaskannya kepada hukum-hukum *syara'* yang ada *nash*-nya.

⁷³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 38.

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 53.

Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan *illat* (alasan) dari pensyariatkan suatu hukum.⁷⁵

d. Serta dalil-dalil yang *Mu'tabar*

a) Istihsan

Istihsan secara etimologi adalah sesuatu sebagai baik.⁷⁶ Menurut Imam al-Bazdawi dalam kasus-kasus tertentu metode *qiyas* sulit untuk diterapkan karena *illat* yang ada pada *qiyas* lemah. Oleh sebab itu, perlu dicarikan metode lain yang mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan-tujuan *syara'*.⁷⁷

b) Mashlahah Mursalah

Secara etimologi *maslahah* adalah manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut ada 5 yaitu :⁷⁸

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 63.

⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 197.

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 103

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114

- 1) Memelihara agama
 - 2) Memelihara jiwa
 - 3) Memelihara akal
 - 4) Memelihara keturunan dan harta.
- c) Sad adz-dzariah

Menurut Ibnu al-qayyim al-Jauziyyah, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin sad adz-dzariah adalah “apa saja yang menjadi perantara dan jalan menuju kesesuatu”. Yang dimaksud sesuatu itu bisa sesuatu yang bernilai maslahat dan yang bernilai mafsadat. Maka perantara atau jalan yang menuju kepada keburukan harus ditutup, inilah yang disebut “sad adz-dzariah”.⁷⁹

Sad adz-dzariah adalah metode ijtihad untuk menetapkan hukum syara' dengan cara mengukur akibat atau dampak dari perbuatan itu sendiri yang mungkin dibolehkan. Tetapi dampak dibelakangnya itu mafsadat, maka menjadi dilarang atau harus dicegah atau ditutup. Itulah yang menjadi inti dari dalil sad adz-dzariah.⁸⁰

⁷⁹Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 132-133.

⁸⁰Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 140.

Jadi, dasar yang diambil MUI yang pertama yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275-280 dan al-Imran ayat 130 tentang pengharaman riba ini sejalan dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengandung unsur riba, dasar kedua MUI yaitu hadits untuk memperjelas dari dasar yang pertama yaitu al-Qur'an sebagaimana juga hadits tentang riba yaitu *“dari Jabir ra.iaberkata: Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba,memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya, ia berkata: mereka berstatus hukum sama”* ini sejalan juga dengan dengan fatwa MUI yang mengatakan BPJS Kesehatan mengandung unsur riba. Jadi, MUI lebih *ikhhtiyat* (hati-hati) dan tegas dalam berfatwa termasuk dalam memutuskan hukum ekonomi syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa. Adapun jika dasarhukum tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, yangpaling penting adalah dalam penggalian hukum tersebut tidakbertentangan dengan ijma', qiyas dan mu'tabar dan

dalil-dalilhukum yang lain seperti istihsan, masalah mursalah dan sadd az-zari'ah.⁸¹

c. Dasar Hukum Putusan Nahdlatul Ulama tentang BPJS Kesehatan

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam bahasa Arab merupakan *masdar* dari kata *qara'a* yang berarti bacaan, selanjutnya, al-Qur'an secara terminologi adalah firman Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada lubuk hati Nabi Muhammad Saw. Dengan lafal bahasa Arab yang diawali surat al-fatihah dan diakhiri surat an-nas yang termasuk ibadah bagi pembacanya, yang dijadikan *hujjah* kerasulannya, dan dijadikan sebagai undang-undang dan petunjuk kehidupan.⁸² Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama.⁸³

Sumber utama putusan Nahdlatul Ulama tentang BPJS Kesehatan yang pertama diambil dari al-Qur'an surat al-Maidah [5]: ayat 2 yang berbunyi:

⁸¹ *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: U-596/MUI/X/1997 Pasal 2 dalam Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 4.

⁸² Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istisbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 40.

⁸³ Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang, Empatdua, 2016), hlm. 33.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Al-Maidah [5]: 2)

Ayat al-Maidah ayat 2 ini memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis BPJS Kesehatan ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan BPJS Kesehatan untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).ini sejalan dengan fatwaNU bahwa BPJS Kesehatan diperbolehkan karena masuk dalam akad *ta'awun*.

2. Hadits

Hadits atau as-sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi Saw yang dijadikan teladan. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah: “apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi”.⁸⁴

Sumber yang kedua putusan Nahdlatul Ulama tentang BPJS adalah diambil dari hadits yang berbunyi:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) متفق عليه

⁸⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 19.

“Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain” (Muttafaq alaih).⁸⁵

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم , مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) متفق عليه

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit” (Muttafaq alaih).⁸⁶

عن النعمان بن بشير , قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ((المؤمن منون كرجل واحد إن اشتكى رأسه , تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر)) أخرجه مسلم

dari Nu'man bin Basyir berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Orang-orang beriman ibarat satu orang, jika bagian kepala

⁸⁵Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 549.

⁸⁶Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 549.

mengaduh, seluruh badan akan menderita demam dan tidak bisa tidur. (HR.Muslim).
 وعن أبي موسى رضي الله عنه , قال : قال رسول الله عليه وسلم : ((إن إلا شعرين إذا أرموا في الغزو , أو قل طعام عيالهم بالمدينة , جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد , ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم)) متفق عليه

Dari Abu Musa ra, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang-orang Asy’ariy, apabila persediaan peperangan mereka hampir habis atau makanan bagi keluarga mereka di Madinah tinggal sedikit, maka mereka mengumpulkan sisa-sisa yang ada dalam satu kain kemudian mereka membagi-baginya sama rata pada satu bejana. Mereka itu termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka, (Muttafaq alaih).

3. Tafsir al-Baghawi

(وتعاونوا) أي : ليعين بعضكم بعضا , (على البر والتقوى) قيل : البر متابعة الأمر , والتقوى مجانبية النهي , وقيل : البر : الإسلام , والتقوى : السنة , (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) قيل : الإثم : الكفر , والعدوان : الظلم , وقيل : الإثم : المعصية , والعدوان : البدعة .

(dan tolong-menolonglah) yaitu membantu satu sama lain (dalam kebaikan dan takwa) kata kebaikan: adalah mengatasi permasalahan dan takwa adalah pencegahan, kata kebaikan: Islam dan takwa: sunnah (dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran) kata berbuat dosa: kafir, pelanggaran: dzolim, berbuat dosa: maksiat, pelanggaran: bid’ah.

4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh

أما التأمين التعاوني : فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا , لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين . وهو قليل التطبيق في الحياة العملية .

Asuransi tolong menolong adalah asuransi yang di sepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan kepada salah satu rekan guna membantu kesulitan yang sedang dialaminya pada saat hal-hal yang di khawatirkan terjadi dan hanya sedikit yang mempraktekkan asuransi semacam ini dalam kehidupan kerja.

موقف الفقه الإسلامي من التأمين : لاشك كما تبين سابقا في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين : لأنه يدخل في عقود التبرعات , ومن قبيل التعاون المطلوب شرعا على البر والخير : لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس , لتخفيف اثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين , أيا كان نوع الضرر , سواء في التأمين على الحياة , أو الحوادث الجسدية , أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان , أو ضد المسؤولية من حوادث السير , أو حوادث العمل , ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح . وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره , ونجحت في مهامها وأعمالها , بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية .

Penjelasan kitab Al-fiqh al-Islamiy mengenai asuransi ialah tidak ditemukannya keraguan hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang di perbolehkannya praktek asuransi semacam ini dalam pandangan ulama-ulama fiqh muslim masa kini, karena hal tersebut merupakan akad-akad tabarru'(murni ibadah

karena Allah SWT) dan juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong dalam kebaikan yang di anjurkan oleh syariat Islam, dikarenakan dalam kelompok tersebut setiap anggota (asuransi) memberikan bantuan kepada rekannya dengan suka rela bertujuan meringankan dampak atas bencana yang menimpanya dan membantu menghilangkan kesulitan yang sedang dialami salah satu rekannya dalam kelompok tersebut apapun kesulitannya, baik menyangkut kelangsungan hidup (asuransi jiwa, kecelakaan anggota tubuh, atau sesuatu yang di sebabkan oleh kebakaran , pencurian , matinya binatang-binatang ternak miliknya atau terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan mulai dari kecelekaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Asuransi tolong-menolong juga tidak melirik pada adanya keuntungan yang didapatkanoleh pemegang saham, atas asas-asas inilah maka perserikatan asuransi tolong-menolong mulai berkembang pesat di negara Sudan dan negara-negara lain dan mencapai tujuan maksimal yang dihasilkan dari kepentingan-kepentingan para asurador dan kinerja mereka dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan asuransi at-ta'awuni itu sendiri.

وأما التأمين بقسط ثابت : فهو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى المؤمن : وهو شركة التأمين المكونة أفراد المساهمين , يتعهد (أي المؤمن) بمقتضاه دفع أداء معين عند تحقق خطر معين . وهو النوع السائد الآن . ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو إلى شخص المؤمن أو إلى ورثته , فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين .

Asuransi bagian tetap (asuransi tijari) adalah asuransi yang keberadaannya dikuasai oleh pemegang saham atas ketersediaan asuransi meyerahkan cicilan pembaharuan kepada mereka (para pemegang saham), dan mereka berjanji untuk menyerahkannya kepada orang yang mereka tentukan ketika hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi dengan berdasarkan ketentuan yang mereka buat ini adalah asuransi yang sedang banyak berlaku sekarang atau menyerahkannya kepada yang membutuhkan atau kepada pemilik saham sendiri atau kepada ahli waris mereka. Asuransi semacam ini merupakan akad mu'awadhoh yang menetapi dua sisi.

والفرق بين النوعين : أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم , ولا يسعى أعضاؤه إلى تحقيق ربح , وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء . أما التأمين بقسط ثابت فيتولاه المؤمن (أي الشركة المساهمة) الذي يهدف إلى تحقيق ربح , على حساب المشتركين المؤمن لهم . وكون المؤمن له قد لا يأخذ شيئاً في بعض الأحيان لا يخرج التأمين من عقود المعاوضات , لأن من طبيعة العقد الاحتمالي ألا يحصل فيه أحد العاقدین على العوض أحياناً .

Adapun perbedaan antara kedua jenis asuransi ini ialah, kalau asuransi at-ta'awuni kendalinya di pegang oleh semua anggota (asuransi) bukan anggota lain dan para anggotanyapun tidak berusaha mendapatkan keuntungan mereka hanya berniat membantu meringankan kerugian yang menimpa sebagian anggotanya, sedangkan asuransi yang kedua dikuasai oleh pemegang saham yang lebih memprioritaskan pendapatan

keuntungan dari banyaknya asuransi yang ikut bekerja sama, sedangkan keberadaan para asuransi sendiri yang tidak mengambil suatu bagianpun sewaktu-waktu dari asuransi tersebut tidaklah bisa menetapkan hal itu sebagai akad mu'awadhoh, karena tabiat akad yang mengandung jaminan pastinya menetapkan adanya ganti rugi/ imbalan yang di dapatkan oleh salah satu dari mereka.

Berdasarkan dalil-dalil diatas NU dalam rujukan al-Qur'an memutuskan bahwa BPJS Kesehatan adalah sesuai syariah karena masuk akadta'awun yang merupakan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Hal ini bisa terlihat pada pemberian danatabarru' secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta yang mengalami musibah, artinya sistem BPJS adalah menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dan kerjasama antar penanggung. Hasil keputusan diatas merupakan hasil keputusan nomor II dari ketujuh Hasil Keputusan *Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah* NU di wilayah Jombang Jawa Timur pada tanggal 1-5 Agustus 2015.

Dalam dasar rujukan bagian hadits dijelaskan bahwasesama muslim harus saling menyayangi, diibaratkan hubunganantara anggota badan, yang mana satu sama lain salingmembutuhkan, merasakan, dan tidak dapat dipisahkan, jika salahsatu anggota badan tersebut sakit, anggota badan

lainnya ikut merasakan sakit. Hal ini dalam konsep BPJS Kesehatan terlihat pada pemberian dana *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta yang mengalami musibah.

Dasar rujukan bagian aqwal ulama menjelaskan tentang diperbolehkannya asuransi tolong menolong. Hal ini dikarenakan asuransi merupakan akad *tabarru'* dan sikap tolong menolong diantara sesama dengan cara kerjasama saling menanggung diantara sesama peserta.

d. Dasar Hukum Putusan Majelis Ulama Indonesia tentang BPJS Kesehatan

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam bahasa Arab merupakan *masdar* dari kata *qara'a* yang berarti bacaan, selanjutnya, Al-Qur'an secara terminologi adalah firman Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada lubuk hati Nabi Muhammad Saw. Dengan lafal bahasa Arab yang diawali surat al-fatihah dan diakhiri surat an-nas yang termasuk ibadah bagi pembacanya, yang dijadikan *hujjah* kerasulannya, dan dijadikan sebagai undang-undang dan petunjuk

kehidupan.⁸⁷ Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama.⁸⁸

Sumber utama putusan Majelis Ulama Indonesia tentang BPJS yang pertama diambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: ayat 275-280 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ﴿٢٧٦﴾ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٧﴾
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

⁸⁷ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 40.

⁸⁸ Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang, Empatdua, 2016), hlm. 33.

مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
 مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
 تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
 إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٧﴾

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.




Al-Imran [3]: 130


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

An-Nisaa' [4]: 36-39

❖ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا


 الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
 وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 
 رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ
 يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا  وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ
 ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۖ وَكَانَ


 اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

37. (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

38. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

39. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka.

At-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حُلِّمْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2. Hadits

Di antara *nash* yang menunjukkan Jaminan Sosial adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Saw bersabda:

نَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَا حِمَمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوهُ نَادَى سَائِرَ جِسْدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam."

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri."

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له , ومن كان له فضل

من زاد فليعد به على من لا زاد له

"Barang siapa mempunyai kelebihan kendaraan yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan. Dan barang siapa mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa."

عن عبد الله , قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله , قال :

قلت : وكاتبه وشاهديه , قال : إنما نحدث بما سمعنا . (رواه مسلم)

Dari Abdullah ra, ia berkata, "Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: Saya bertanya, "(Apakah Rasulullah saw melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?" Ia (Abdullah) menjawab, "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR Muslim)

عن جابر , قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله

وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . (رواه مسلم)

Dari Jabir ra , ia berkata, "Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan,

menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata, "Mereka berstatus hukum sama." (HR Muslim)

عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يأتي على الناس زمان يأكلون الربا , فمن لم يأكله أصابه من غباره . (رواه النسائي)

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil) nya, ia akan terkena debunya.'" (HR an-Nasa'i)

عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الربا سبعون حوبا يسرها أن ينكح الرجل أمه . (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya'" (HR Ibnu Majah)

عن عبد الله , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الربا ثلاثة و سبعون باب . (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR Ibnu Majah)

عن عبد الله بن مسعود , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهد به وكاتبه

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, "Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR Ibnu Majah)

عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأتين على
الناس زمان لا يبق منهم أحد إلا اكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorangpun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena debunya."(HR Ibnu Majah)

3. Pendapat para ulama:

1) Ijmak ulama:

Adapun dalil Ijmak adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/paceklik pada zaman Umar bin Khathab ra, dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzaki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

2) Dalil aqli:

Adapun dalil aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya

saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya, runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.⁸⁹

Jadi, dasar yang diambil MUI yang pertama yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275-280 dan al-Imran ayat 130 tentang pengharaman riba ini sejalan dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengandung unsur riba, dasar kedua MUI yaitu hadits untuk memperjelas dari dasar yang pertama yaitu al-Qur'an sebagaimana juga hadits tentang riba yaitu *“dari Jabir ra.ia berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya, ia berkata: mereka berstatus hukum sama”*

⁸⁹Disadur pada <http://mui.or.id> diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

ini sejalan juga dengan dengan fatwa MUI yang mengatakan BPJS Kesehatan mengandung unsur riba.

Berdasarkan dalil-dalil MUI tentang BPJS ijtima' ulama sepakat bahwa kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya.

Sistem jaminan sosial MUI sepakat berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh. kuat, dan tidak terpengaruh oleh guncangan-guncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.

4. Kaidah Fiqiyyah

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijaksanaan seorang kepada Negara (imam) terhadap rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan rakyatnya”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan

mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.⁹⁰

Menurut Imam Syafi'i, perumpamaan seorang penguasa terhadap rakyatnya ibarat seorang pengampu (wali) terhadap pengampuannya (anak yatim atau *safih*). Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala Negara harus menempuh kebijakan berdasarkan *manhaj syar'i*, yaitu berlandaskan asas maslahat umum, segala sesuatu yang dihalalkan dijalankan, sebaliknya, segala sesuatu yang diharamkan ditinggalkan.

Berdasarkan kaidah ini, dalam menggunakan kekayaan Negara, pemerintah tidak boleh menggunakannya secara sembarangan, yang tidak berdasarkan asas kemaslahatan umat.⁹¹

—الدليل على التَّحْرِيمِ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ

“Bahwa pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”

⁹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016) hlm. 147.

⁹¹ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 113-114.

Kaidah ini berdasarkan firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى
الْأَسْمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS.Al-Baqarah : 29)

Serta berdasarkan hadits Nabi:

ما احلَّ الله فهو حلالٌ وما حرَّم فهو حرامٌ وما سَكَتَ عنه فهو عفوٌّ فاقبلوا
من الله عَافِيَتَهُ

Artinya: “Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, sedang apa yang didiamkan adalah dimaafkan, maka terimalah kemaafan itu dari Allah”.⁹²

Jadi, apabila ada sesuatu yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh.

-الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah Swt

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “...Janganlah kamu rujuk mereka untuk memadaratkan... (QS. Al-Baqarah 231)”

⁹² Ibid

Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله و من شق شق الله عليه [رواه الامام مالك]

Artinya: “Tidak boleh memadaratkan dan dimadaratkan, barang siapa yang memadaratkan maka Allah Swt akan memadaratkannya dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya” (HR. Imam Malik).

Maksud dari kaidah ini ialah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam islam.⁹³

Contoh penerapan kaidah ini ialah larangan menimbun dana masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratn bagi rakyat.

- الامور بمقاصدها

“Segala sesuatu berdasarkan tujuannya”

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah Swt:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٠٦﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka

⁹³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 136.

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.(QS. Al-Bayyinah : 5)

Rasulullah Saw pun bersabda:

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

Maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara bergantung pada tujuan, motif, dan niatnya. Dengan kata lain, niat, motif, dan tujuan terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum yang ia lakukan.⁹⁴Tempatnya niat adalah di dalam hati sebab pada hakikatnya niat adalah menyengaja (*qashdu*) secara mutlak, dan menurut Imam Baidhowi niat sebagai ungkapan dari kehendak hati (*inbi'atsul qalb*).

⁹⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 132.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Mukhtar NU Ke-33 tentang BPJS Kesehatan, maka dari uraian-uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan.

Adapun Fatwa Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad *ta'awun*.

Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah Cikura Tegal Jawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar, maysir dan riba*.

2. Perbandingan metode *istinbath* dan dasar hukum (*hujjah*) Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan.

Adapun persamaannya terkait dengan BPJS Kesehatan yaitu pada dalil al-Qur'an (QS. al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong), serta persamaan persepsi mengenai konsep *ta'awun* yang ada pada BPJS Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan hadits (NU rujukannya hadits tentang tolong menolong sedangkan MUI rujukan haditsnya tentang pengharaman Riba), metode *istinbath* hukum yang digunakan (NU menggunakan metode Qauli, Ilhaqi, dan Manhaji sedangkan MUI menggunakan metode yang bersumber dari 4 sumber hukum yaitu, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas).

Sedangkan perbedaan mengenai hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Fatwa MUI terkait dengan akad antar para pihak, belum sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Dan pada tanggal 4 Agustus 2015 pemerintah-MUI sepakat BPJS Kesehatan direvisi agar sesuai syariah. Untuk itu pada poin ketiga hasil kesepakatan disebutkan, program BPJS akan disempurnakan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* inilah yang menyebabkan program BPJS disebut tidak sesuai syariah. Sedangkan menurut

Muktamar NU Ke-33, BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.

- b. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *Ijtima'* hukum yang bersumber dari 4 sumber hukum yaitu, Al-Qur'an, Hadith, Ijma', Qiyas,
Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan metode *Istinbath* hukum yaitu : Qauliy, Ilhaqi, dan Manhaji.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu :

- a. Langkah yang harus diambil pemerintah dan pengelola BPJS Kesehatan adalah membuka dialog dengan MUI untuk memberi masukan komprehensif sehingga komisi fatwa MUI bisa mendapatkan informasi langsung dari BPJS terhadap bahan kajiannya untuk dilakukan *tabayyun* (cek dan ricek) soal BPJS Kesehatan. Kalaupun MUI tetap menyarankan sistem syariah, tentu akan lebih mudah mengonversinya ke sistem BPJS syariah apabila sudah terjalin dialog sebelumnya.
- b. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem konvensional menjadi sistem BPJS Kesehatan yang syariah.
- c. kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan yang baik terhadap seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan tidak membedakan antara pihak yang satu

dengan pihak yang lainya seperti tidak ada lagi kasus penolakan Rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbi'l'alamin Penulis panjatkan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah, Halal dan Haram*, Solo: tiga serangkai, 2007.

Ali, zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Aravik, Havis. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Malang, Empat dua, 2016.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybahwa An-Nadzair fil Furu', tt*, Maktabah Musthafa Muhammad.

BPJS Kesehatan Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI., 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Effendi, Satria. *UshulFiqh*, Jakarta: KENCANA, 2015.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia , No. U-596/MUI/X/1997, Pasal 2.

Fatah Idris, Abdul. *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

Ghozali Ihsan, A. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Multimedia Grafika, 2015.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

- Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke II, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan UshulFiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI–Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada, 2006.
- Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M),Cet III* Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Menatap Masa Depan NU*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Ma'ruf, Jamal. *Rezim Gender di NU*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015.
- Muhammad Yasinibn Isa al-Fadani, Abul Faidh. *al Fawaid al-Janiyyah Juz II*, Dar al-Islamiyyah.
- Muhtadi Anshor, Ahmad. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Muhyiddin, Ushul Fiqh 1: *Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Pujosuarno, Sayekti. *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta, 1992.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU cet II*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: U-596/MUI/X/1997 Pasal 2 dalam Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Rahardjo, Irvan. *Politiik Asuransi Indonesia*, Jakarta: Gagas Bisnis, 2012.

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.

Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suharto, Edi. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung: ALFABETA, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Subgyo, Joko. *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Ulum, Amirul. *Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Wisnu, Dinna. *Politik Sistem Jaminan Sosial*, Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 60 ayat (1), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

SKRIPSI

Kardi Fidmatan dengan judul “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016). Repository.uin.alauddin.ac.id/1671/...diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 21.08 wib.

Khurotun ‘Ainiyah dengan judul “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016). Repository.iainpurwokerto.ac.id/1005/ diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 18.26 wib.

Muhamad Syafii dengan judul “*Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasar Teori Masalah*”, (Skripsi: UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
Etheses.uin.malang.ac.id/6931/1/13220209.pdf diakses pada
tanggal 17 Maret 2018 pukul 20.36 wib.

JURNAL

Jurnal Al-Ahkam, Wasyith dengan judul: Revitalisasi Maqasid dalam
Perbankan Syariah,(Jurnal: UIN Walisongo Semarang: 2017).

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1823>
diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

<https://tafsirq.com/media/89/pedoman-umum-asuransi-syariah.pdf>
diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 16.27 wib.

INTERNET

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses
pada Tanggal 20 November 2017 pukul 8.40 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, diakses 23 November
2017 pukul 8.45 wib.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/5> diakses
pada Tanggal 20 November pukul 8.50 wib.

<https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> diakses pada
tanggal 1 Januari 2018.

<http://mui.or.id> diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

[Mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/](http://mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/) diakses pada tanggal 24 Februari pukul 8.45
wib.

[Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf) diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib.

<http://www.nu.or.id/post/red/684/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam> diakses pada tanggal 10 Juli 08 pukul 13.5. wib

Ma'ruf Amin selaku ketua bidang fatwa MUI di dalam wawancaranya siaran Kompas TV pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 4.58 wib.
Lihat <https://youtu.be/LRwneyYyTGQ>

Jaih Mubarak selaku wakil ketua DSN-MUI didalam wawacaranya siaran Metro TV pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 17.13 wib. Lihat <https://youtu.be/EN-qym01jFk>

[Mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/](http://mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/) diakses pada tanggal 24 Februari pukul 8.45 wib.

II. HUKUM ASURANSI BPJS

Deskripsi :

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib

mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar: Rp.25.500, Rp.42.500, dan Rp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka: Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investasi lainnya.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum setoran BPJS di bank konvensional ?
2. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam?
3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS ?
4. Apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran yang disepakati ?
5. Bagaimana hukum investasi dana yang dilakukan oleh BPJS di berbagai sektor ?

Jawaban :

1. Selama ini dana BPJS disetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah diputuskan bahwa menurut NU hukum bank konvensional adalah khilaf : halal, mubah, syubhat.
2. BPJS sesuai dengan syariat islam dan masuk dalam aqad ta'awun
3. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga negara mengikuti program BPJS, dengan catatan bagi yang miskin biaya ditanggung oleh pemerintah.
4. Boleh bagi yang mampu membayar
5. Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi memenuhi kebutuhan dana kesehatan, namun jika investasi pada sektor yang jelas haramnya atau masih diragukan kehalalannya maka hukumnya haram.

Referensi :

1. Al-Qur'an

((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) (المائدة : ٢)

2. Hadits

— عن أبي موسى - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالنَّيْلَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَيْكَ بَيْنَ أَضَاجِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . البخاري ١٦٩/٣ (٢٤٤٦) ، ومسلم ٢٠/٨ (٢٥٨٥)

— عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحَقَى)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . البخاري ١١/٨ (٦٠١١) ، ومسلم (٢٥٨٦) ٢٠/٨

- عن الثعلبان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التؤمنون كرجل واحد وإن اشتكى رأسه، تداعى ساير الجسد بالحق والشكر)) أخرجه مسلم (٢٠٠٠/٤، رقم ٢٥٨٦)

- وعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((إن الأشعريين إذا أُرسلوا في الغزو، أو قُلَّ طعامهم بالمدينة، جمَعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسَموه بينهم في إثاء واحد بالشَّوْبة فهُم مِنِّي وأنا مِنهم)) معنَى عليه (أخرجه: البخاري ١٨١٣/٣ (٦٨٤٢)، ومسلم ١٧١٧/٧ (٢٥٠٠))

- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي تَرْهَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أُرْسِلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِثَاءٍ وَاحِدٍ بِالشَّوْبَةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (صحيح مسلم ج ١٢ ص ٣٠٠)

- قوله: ((إن الأشعريين إذا أُرسلوا في الغزو إلى آخره)) معنَى (أُرسلوا) فَبَيْنَ طَعَامِهِمْ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ، وَفَضِيلَةُ الْإِثَارِ وَالْمَوَاسَاةِ، وَفَضِيلَةُ خُلُطِ الْأَزْوَادِ فِي الشَّرِّ، وَفَضِيلَةُ جَمْعِهِمَا فِي شَيْءٍ عِنْدَ قِلَّتِهِمَا فِي الْخَضَرِ، ثُمَّ بَقَسِهِمْ، وَلَيْسَ الْفَرَادُ يَهْدِي الْفِتْنَةَ الْمَفْرُوقَةَ فِي كُتُبِ الْفَقْهِ بِشُرُوطِهَا، وَمَنْعَتِهَا فِي الزِّيَوَاتِ، وَاسْتِزَامِ الْمَوَاسَاةِ وَغَيْرِهَا، وَإِنَّمَا الْفَرَادُ هُنَا إِخَاةٌ تَعْضُهُمْ بَعْضًا وَمَوَاسَاةٌ بِالْمَوْجُودِ. (شرح مسلم للنووي ج ٨ ص ٢٧٠)

- قال: قال رسول الله: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُغْتَرِبِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (صحيح مسلم ج ١٧ ص ١٩)

3. Tafsir al-Baghawi

{ وتعاونوا } أي: ليعين بعضهم بعضاً، { على البرِّ والتَّقْوَى } قيل: البرُّ متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي، وقيل: البر: الإسلام، والتقوى: السَّعْيُ، { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } قيل: الإثم: الكفر، والعدوان: الظلم، وقيل: الإثم: المعصية، والعدوان: البدعة، (الجزء الثاني، ص. ٩)

4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh

أما التأمين التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قابل التطبيق في الحياة العملية. (الفقه الإسلامي وأدلته (١٠١/٥))

الفقه الإسلامي وأدلته (١٠٨/٥)

موقف الفقه الإسلامي من التأمين: لا شك كما تبين سابقاً في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس، لتخفيف آثر المخاطر وتزعم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، إلا أن نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسدية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السير، أو حوادث العمل، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح، وعلى هذا الأساس نشأت

شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره، ونجحت في محامها وأعمالها، بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية.

الفقه الإسلامي وأدلته (١٠٢/٥)

وأما التأمين بقسط ثابت: فهو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى المؤمن: وهو شركة التأمين المكونة من أفراد المساهمين، يتعهد (أي المؤمن) بمقتضاء دفع أداء معين عند تحقق خطر معين. وهو النوع السائد الآن. ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو إلى شخص المؤمن أو إلى ورثته، فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين.

والفرق بين النوعين: أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم، ولا يسعى أعضاؤه إلى تحقيق ربح، وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء. أما التأمين بقسط ثابت فيتولاها المؤمن (أي الشركة المساهمة) الذي يهدف إلى تحقيق ربح، على حساب المشتركين المؤمن لهم. وكون المؤمن له قد لا يأخذ شيئاً في بعض الأحيان لا يخرج التأمين من عقود المعاوضات، لأن من طبيعة العقد الاحتياطي ألا يحصل فيه أحد المعاقدين على العوض أحياناً.

5. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ١٠ ص ٢٦٤

(قوله) وَتَحْتَ الْإِسْتِثْنَاءِ أَنْ كُلَّ مَا أَمْرُهُ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعَقْدٍ كَالْمُسْتَوْفِ (إِلَى) وَهُوَ الْمَقْتَضَى فَقَدْ صَرَّحَ بِالْقُدْرَةِ الزَّائِفَةِ فِي بَابِ قَالِ الْبَغَاءُ وَعَلَى هَذَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّ النُّفُوجَةَ عَلَيْهِ وَخَوْبُ الصَّدَقَةِ بِالْأَمْرِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَحَاطُّ بِرِكَاهِ الْفَطْرِ فَفِي فَضْلِ غَنَى شَيْءٍ مَا يُنْتَفَرُ ثُمَّ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ عَنْهُ بِأَقْلٍ مُتَقَوِّلٍ هَذَا إِذْ لَمْ يَحْتَمِلْ لَهُ الْإِمَامُ قُدْرًا. فَإِنْ عُرِّنَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ فَالْأَنْسَبُ بِمَقْصُودِ كَلَامِهِمْ لَزُومَ ذَلِكَ الْقُدْرَةِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ يَتَغَيَّرُ شَيْئُهُ بِمَا إِذَا فَضَلَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ عَنْ كِتَابَةِ النُّعْمِ الْغَالِبِ وَتَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالُ لَنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ بِقَارِبِ الْوَاجِبِ فِي رِكَاهِ الْفَطْرِ قُدْرَ بِنَا أَوْ فِي أَحَدٍ خِصَالِ الْكُفَّارَةِ قُدْرَ بِنَا. وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ، وَأَمَّا الْعَقْدُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُنْتَفَرُ بِالْحَقِّ وَالْكَفَّارَةِ فَخَيْثُ لَزِمَهُ بِنَةُ فِي أَخِيحِهَا لَزِمَهُ عَقْدُهُ إِذَا أَمْرُهُ بِهِ الْإِمَامُ شَرَحَ مَوْ (قوله) التَّوَسُّوْنَ بِمَا يُوجِبُ الْعَقْدَ فِي الْكُفَّارَةِ كَذَا مَوْ

6. Fath al Mu'in

فتح المعين مع إعانة الطالبين (١٨٢/٤)

(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذوي ومستأمن جاع لم يصل حالة الإضرار أو عار أو نحوها والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولموتة عند احتلال بيت المال وعدم وفاة ركة (قوله) ودفع ضرر معصوم) (وقوله) لم يصل حالة الإضرار) أما إذا وصل إليها فيجب إبطامه على كل من علم به ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة وإن كان يحتاجه عن قرب (قوله) أو عار) معطوف على جاع (قوله) أو نحوها) أي نحو الجائع والعاري كريض (قوله) والمخاطب به) أي يدفع الضرر عن ذكر (قوله) بما زاد) متعلق بموسر (قوله) عند اختلاف الخ) متعلق بالمخاطب أي أن المخاطب يدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاة الركة أو نحوها بكفاية فإن لم يخل ما ذكر أو وقت الركة بها لا يكون الموسر هو المخاطب به بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الركة.

7. Bughyah al-Mustarsyidin

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٥٣
(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولمونه ستر عورة العاري وما بقي بدنه من مبيع تهم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذي بتضيله، وعجارة سور بلد، وكفاية الثاقين بحفظها، والقيام بشأن ثائرة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المتضى وصرفه في مصارفه.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٥١
(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن آتوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياه من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادته صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٧١
(مسألة: ي): أرزاق القضاة كثيرهم من الثاقين بالمصالح العامة من بيت المال، يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تمييز، فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة، ولا يجوز أخذ شيء من المتداعين، أو ممن يحلفه أو يعتقد له التلاح.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ١٤٢
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م) ورتد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو مجبراً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا ياتم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه ياتم اه. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه يجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بمرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنيك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاري، مخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شره الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه.

8. Qurrah al-Ain

قرة العين للشيخ حسين المغربي المالكي ص: ٣٣٢
(مسئلة) قال الشيخ التنيكي في تكميل الديباج آخر ترجمة العلامة الشيخ ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ابو اسحاق الشهير بالشلطي ما نصه: وكان صاحب الترجمة بمن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجاتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس كما وقع للشيخ المالتي في كتاب الورع قال توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة ولاشك عندنا في جوازه وظهور مصلحته

في بلاد الأندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج اليه الناس وضعف بيت المال الذي عنه فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس وإنما النظر في القدر المحتاج اليه من ذلك وذلك مؤكول الى الإمام وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موطئا على أهل الموضع فستل عنه أمام الوقت في الفتيا بالأندلس الاستاذ الشهير ابو سعيد بن لب فافتي انه لا يجوز ولا يسوغ وافتي صاحب الترجمة بسوغه مستندا فيه الى المصلحة المرسلة معتقدا في ذلك الى قيام المصلحة التي ان لم يبق بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت وقد تكلم على المسئلة الإمام الغزالي في كتابه فاستوفى ووقع لأين الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفتياته كلام مشهور لا طائل به اه .

9. Al-Furuq

[القرافي: الفروق ج ٤ ص ٨]

((الفرق بين قاعدة ما يضمن بالطرع من السفن وقاعدة ما لا يضمن)) قال مالك: «إذا طرغ بعض الحمل للشارك أهل المطروح من لم يطرغ لم يضمن، وكان ما طرغ وسلم جميعهم في غائه وقضه ثمنه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد، بغير عناية، لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم، والعمل عدم اختصاص - أي عدم تحميله له وحده - أحدهم بالمطروح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهو بسبب سلامة جميعهم»

10. Al-'Inayah Syarh al-Hidayah

العناية شرح الهداية - ١٢ / ٢٩٧

قال الميرغنياني: «ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة لأن العادة الظاهرة أن الإنسان يهتدي إلى من قوة ليضوته بجناحه، وإلى من قوة ليخلطه، وإلى من يساويه ليتعوضه، وإذا تعذر الخلل فيما هو المقصود من العقد يتحقق العائد من الشئ كالشئ في إذا وجد بالتصريح عينا (فتثبت له ولاية الشئ عند قوالب المقصود إذ العقد يثبت»

11. Raudlah al-Thalibin

روضة الطالبين - ٥ / ٣٨٤

أن الهبة مقيدة بنفي الثواب وإثباته ومعلقة ومضى الكلام في المتيقنة وفرعناها على المذهب والذي قطع به الجمهور وهو صحبتها وقيل إنها باطلة إذا أوجبنا الثواب في المعلقة لأنه شرط يخالف مقتضاها وأما القسم الثاني وهي المطلقة فينظر إن وهب الأعلى للأدنى فلا ثواب. وفي عكسه قولان أظهرهما عند الجمهور لا ثواب والثاني يجب الثواب فعل هذا هل (هو) قدر قيمة الموهوب أم يرضى به الواهب أم ما بعد ثوابا لثله في العادة أم يكفي ما يتحول فيه أربعة أوجه وقيل أقوال: أحسبها أولها والخيار في جنسه إلى المتب فعل الأصح لو اختلف قدر القيمة فلا اعتبار بقيمة يوم القبض على الأصح وقيل يوم بذل الثواب ثم إن لم يثبت ما يصلح ثوابا فللواهب الرجوع إن كان الموهوب بماله قلت قال أصحابنا ولا يجرى المتب على الثواب قطعا والله أعلم. فإن زاد زيادة منفصلة رجع فيه دونها وإن زاد متصلة رجع فيه معها على الصحيح وقيل للمتب إسكاسه وبذل قيمته بلا زيادة وإن كان تألفا فوجهان: وقيل قولان منصومان في التقديم أحسبها يرجع بقيمة والثاني لا شيء له كالأب في هبة ولده، وإن كان ناقصا رجع فيه وفي تفرعه المتب أرض النقصان والرجحان وقيل له ترك العين والمطالبة بكمال القيمة قلت وإن كانت جارية قد وطئها المتب رجع الواهب فيها ولا يجرى على المتب لأنه وطئها ملكه والله أعلم. وأما إذا وهب نظيره فالمذهب المقتطع بأن لا ثواب، وقيل فيه القولان: وعن صاحب الترتيب طرد القولين في هبة الأعلى للأدنى وهو شاذ قلت وحكي صاحب الإبانة والبيان

وجها أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب استحقه ولا فتولان فإن اختلفا في النية فأبيا يقبل قوله وجهاً، والمذهب أنه لا يجب الثواب في جميع الصور قال المتولي إذا لم يجب فأعطاه المتب ثواباً كان ذلك ابتداءً به حتى لو وهب لآبائه فأعطاه الآبائون لا ينتفع حتى الرجوع ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعاً صرح به بغوي وغيره وهو ظاهر، وأما الهدية فالظاهر أنها كالهبة والله أعلم. وأما القسم الثالث فالمقدمة بالثواب وهو إما معلوم وإما مجهول فالحالة الأولى المعلوم فيصح العقد على الظاهر ويطل على قول فإن صحنا فهو بيع على الصحيح، وقيل هبة فإن قلنا هبة لم يثبت الخيار والشفعة ولم يلزم قبل القبض وإن قلنا بيع ثبتت هذه الأحكام، وهل ثبتت عقبة العقد أم عقب القبض قولان: أظهرها الأول ولو وهبه حلياً بشرط الثواب أو مطلقاً وقلنا الهبة تقتضي الثواب فنص في حرملة أنه إن آتاه عقب العقد أم عقب بنفسه اعتبرت المائلة وإن آتاه بعد التفرق بعرض صحيح والنقد لا يصح لأنه صرف وهذا تفريع ذلي أنه بيع وفي الشبهة أنه لا بأس بشيء من ذلك لانا لم نلتحق بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض وكذا سائر الشروط.... إذا كان الثواب مجهولاً فإن قلنا الهبة لا تقتضي ثواباً بطل العقد لتعذر تصحيحه بما وهبه وإن قلنا تقتضيه صح وهو تصريح يقتضي العقد هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور

12. Syarh Ma'aniy al-Atsar li al-Thahawiy

شرح معاني الآثار للثحافوي رقم ٣٨١٦

مَرْزُوقٌ بْنُ الْحَكَمِ، أُنْجَزَ بِنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هَبَةً لِمَنْ يَلِيقُ بِهِ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِمَنْ لَا يَلِيقُ بِهَا يَرْجِعُ عَلَى هَبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا»

13. Tahrir al-Kalam fi Masail al-Iltizam

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الخطاب ص ٤٥

(وهو التزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف من غير تعليق على شيء، فدخل في ذلك الصدقة، والهبة والخمس، والعارية، والعمرى، والعريّة، والمنحة، والإرقاق والإعدام، والإسكان، والضمان، والالتزام بالمعنى الأخص....) (وهذا القسم يقتضي على الملتزم ما لم يفسد، أو يموت، أو يمرض مرض الموت إن كان الملتزم له - بفتح الزاي - معيناً، ولا أعلم في القضاء به خلافاً إلا على القول بأن الهبة لا تلزم بالقول، وهو خلاف المعروف من المذهب، بل قل إن رشد الاتفاق على لزوم الهبة بالقول وإن كان الملتزم له غير معين....)

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الخطاب ص ٧٣ / (المقدمة ج ١٣ ص ١٠٩ طبعة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ١٣٢٣ هـ لصاحبها محمد إسماعيل).

قال مالك: (لأن ذلك معروف، والمعروف من أوجبه على نفسه لزومه) -

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الخطاب ص ٧٤ / (مواهب الجليل للإمام الخطاب ج ٦ ص ٥٦ طبعة السعادة ١٣٢٩ هـ)

قال ابن رشد قوله: (فهذا أمر قد أوجبه على نفسه، والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يفسد).

**KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V**

Tentang

**MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH)**

Ijtimu Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M setelah :

Menimbang :

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtimu Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtimu Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtimu Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si, Direktur Badan Peradilan Agama MA RI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin Adams, dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Ijtimu Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional;
4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan dalam Sidang Pleno Ijtimu Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penguasaan Lahan dan Sumber Daya untuk Kemakmuran Umat;

5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.
6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB OJK dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Secara Syariah;
7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: Kontrak Kemaslahatan dan Kesejahteraan;
8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Istihalah;
9. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V;
10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam sidang Pleno dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyah Mu'asirah*) yang meliputi; **Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan Bpjs Kesehatan; Status Hukum Iuran Dan Manfaat Pensiun; Hubungannya Dengan Tirkah; Istihalah.**
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah

Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H

9 Juni 2015 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua,

Sekretaris,

DR. KH. MA'RUF AMIN

DR. H. NOOR AHMAD

KEPUTUSAN KOMISI B 2
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN

A. Deskripsi Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syariah?

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْم، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبَسِّمُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمُورِكُمْ لَا تَقْظِلُمْوْنَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَعُسْرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah pengkhianat; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu menaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 275-280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali 'Imran [3]: 130).

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْحَارِ جِي وَبِالْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ جِي وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ

مُخْتَلًا فَيُخْرَوْنَ. الَّذِينَ يَنْحُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْمُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatipun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (37) (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (38) Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (39) Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. (QS An Nisa':36-39)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبٍّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (QS Al-Baqarah:177).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS At Taubah:71).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS Al Maidah:2)".

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh *manhaj Ilahi* seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim. Semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.

2. Dalil Dalam Hadits

Diantara *nash* yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُهُمْ وَتَوَادُّهُمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوهُ نَادَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ
بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam".

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya sendiri".

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ

"Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan - yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نَحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ، رقم: 2994)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2995)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus bukm sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَهَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَتَكَبَّحَ الرَّجُلُ أَمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبِيهِ وَكَاتِبِيَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعِي مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَهَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

3. Pendapat para ulama:

a. Ijma' ulama:

Adapun dalil *Ijma'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga *muzakki* (orang yang berzakat) kesulitan menemukan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

b. Dalil Aqli

Adapun dalil *Aqli* untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.

c. AAOIFI (*Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah*) tahun 2010 No. 26 tentang *Al-Ta'min Al-Islamy*.

d. Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

e. Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

f. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta'widh).

E. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut adalah:

1. agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
2. agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 11 Januari 1996
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kluwan Rt. 04 Rw. 04 Kec.
Penawangan Kab. Grobogan.

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN Wedoro Penawangan tahun 2008
2. Tamat SMP Islam Walisongo Penawangan tahun 2011
3. Tamat MA Salafiyah Kajen Pati tahun 2014

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII tahun 2014-2015
2. Anggota IMPG tahun 2014-2015

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 April 2018

Ernawati
NIM: 1402036041